

PERSPEKTIF SPASIAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI YOGYAKARTA

Umi Listyaningsih

Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada
listyaningsih_umi@yahoo.com

Abstrak

Kemiskinan merupakan salah satu dimensi dari lima dimensi perangkap kemiskinan menurut Robert Chambers. Dimensi kemiskinan tersebut adalah kerentanan, kelemahan jasmani, ketidakberdayaan, dan isolasi wilayah. Isolasi wilayah berhubungan dengan aksesibilitas. Sementara itu akses merupakan media terbukanya peluang-peluang sosial dan ekonomi. Kajian berikut melihat kemiskinan berdasarkan kondisi topografi sebuah wilayah sebagai alat untuk menggambarkan aksesibilitas. Kajian ini juga bertujuan mengetahui tingkat kemiskinan yang pada akhirnya digunakan untuk menentukan program penanggulangan kemiskinan. Kemiskinan ditentukan berdasarkan penerima beras miskin. Jumlah keluarga miskin di kedua daerah penelitian adalah 207. Selain wawancara terstruktur dengan menggunakan kuesioner, penelitian ini juga melakukan kajian kualitatif dengan cara wawancara mendalam. Tujuan penelitian tentang tingkat kemiskinan dan penentuan program penanggulangan kemiskinan dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan tabel silang. Faktor yang mempengaruhi kemiskinan dianalisis dengan menggunakan koefisien regresi. Karakteristik demografi, sosial, dan ekonomi kepala keluarga miskin di kedua daerah penelitian tidak menunjukkan perbedaan. Rata-rata umur kepala keluarga sekitar 50 tahun, tingkat pendidikannya rendah yaitu SMP, dan kepala keluarga pada umumnya bekerja di sektor jasa. Potensi ekonomi keluarga miskin tidak menunjukkan perbedaan menurut kondisi topografi. Keluarga miskin di daerah dataran berinvestasi dalam bentuk tabungan, sementara keluarga miskin di daerah perdesaan berinvestasi berupa perhiasan. Meskipun tingkat kemiskinan di kedua wilayah tidak menunjukkan perbedaan, namun kemiskinan di daerah perdesaan lebih disebabkan faktor budaya atau kultur, sementara itu kemiskinan di daerah dataran bersifat struktural. Faktor kemiskinan mempengaruhi jenis program penanggulangan kemiskinan agar efektif dan tepat sasaran. Manajemen implementasi program merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam realisasi program penanggulangan kemiskinan yang ditentukan.

Kata kunci: kemiskinan, isolasi, regresi

SPATIAL POVERTY OF POVERTY ALLEVIATIONS IN BANTUL DISTRICT OF YOGYAKARTA

Abstract

Poverty is one of dimension of the five dimensions of poverty trap by Robert Chambers. Those poverty dimensions are vulnerability, physical weakness, powerless, and region isolation. The region isolation associate to the accesibility. Meanwhile, access is a media to open the social and economic opportunity. This research see the poverty base on topography condition as a tool to figure the accesibility. Also, this research aim to examine the poverty level which ultimately use to determine the poverty alleviation programs. Poverty is determined base on beneficiaries of rice ppoor (Beras Miskin). The number of poor family in the two research area are 207. Besides structural interview using questionnaire, this research also use qualitative methode by using indepth interview. The aim of the reseach about level of poverty and determine the poverty alleviation programs will be analysed descriptively using cross tabulation. Meanwhile, influencing factor on poverty will be analysed using coefisien regression. The demographic, social and economic characteristic of the head of poor family at two research showed there was no differention. The age average of the head of family approximately 50 year, the level of education was low, namely junior high school, and in generally the head of family work on service sector. The economic potention of the poor family did not show a differention as topography condition. The poor family at up land area has invested on the form of saving, meanwhile the poverty at low land area tend to structural. The poverty factors influence the type of poverty alleviation programs

for efectivity and righ to the target. The management of program implementaion was one aspect that need to be seen in the realisation of poverty alleviation programs that been determined

Keywords: *isolation, poverty alleviation programs, regression*

I. PENDAHULUAN

Ironis mendiskusikan persoalan kemiskinan ditengah gencarnya upaya penanggulangan kemiskinan yang diinisiasi sejak puluhan tahun yang lalu. Kemiskinan selalu diangkat dalam diskusi diberbagai forum nasional maupun internasional dengan kata-kata yang lebih baik seperti peningkatan kesejahteraan, perbaikan sosial ekonomi masyarakat, ataupun program pemberdayaan kelompok sasaran. Fakta pembangunan, ketimpangan pertumbuhan ekonomi masih timpang antar wilayah baik itu dikotomi perdesaan-perkotaan, ataupun jawa-luar jawa. Perbedaan inilah yang pada akhirnya berpengaruh terhadap karakteristik dan ketersediaan sarana dan prasarana ekonomi dengan muara pertumbuhan ekonomi ataupun penanggulangan kemiskinan.

Fenomena tersebut diatas memang terasa ganjil manakala program pengentasan kemiskinan telah menjadi agenda semua lembaga atau instansi pemerintah, swasta, maupun kemasyarakatan. Ada dugaan kurang tepat dalam perumusan dan implementasi kebijakan untuk memberantas kemiskinan dan memberdayakan penduduk miskin. Selama ini kemiskinan lebih sering dikaitkan dengan dimensi ekonomi karena dimensi inilah yang paling mudah diamati, diukur, dan diperbandingkan. Padahal kemiskinan bersifat multidimensi dengan faktor penyebab yang sangat beragam seperti sosial, budaya, sosial politik, lingkungan (alam dan geografis), kesehatan, pendidikan, agama, dan budi pekerti.

Dalam bingkai strategi penanggulangan kemiskinan, kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Definisi kemiskinan ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Kemiskinan tidak hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang dipahami secara umum antara lain terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik.

Kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks, bersifat multidimensi dan tidak dapat secara mudah dilihat dari suatu angka absolut. Luasnya wilayah dan sangat beragamnya budaya masyarakat menyebabkan kondisi dan permasalahan kemiskinan menjadi sangat beragam dengan sifat-sifat lokal yang kuat dan pengalaman kemiskinan yang berbeda. Variasi determinan kemiskinan menjadi menarik dilihat secara spatial karena karakteristik sosial ekonomi masyarakat sangat terkait dengan karakteristik ruang. Ruang secara fisik dan sosial bermakna dalam perkembangan kehidupan manusia, tidak terkecuali pembangunan ekonomi. Identifikasi akar masalah kemiskinan secara spatial sangat dibutuhkan untuk mendapatkan program penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran dan tepat guna.

Ruang dalam kerangka pemikiran Robert Chamber dapat digambarkan dari keterisolasian yang pada akhirnya berdampak pada perbedaan aksesibilitas terhadap peluang dan kesempatan ekonomi. Keterisolasian diwakili oleh karakteristik wilayah kajian yang berbeda dari sisi topografi dan status kewilayahan yaitu perkotaan dan perkotaan. Wilayah kajian terdiri dari wilayah perkotaan yang merupakan wilayah dengan topografi datar dan sebagai pusat pemerintah kabupaten, sementara wilayah yang lain dengan topografi terjal dan sebagai daerah perdesaan dengan karakteristik daerah dataran tinggi. Asumsi yang dibangun adalah wilayah ini memiliki ketersediaan sarana dan prasarana sosial ekonomi yang berbeda secara signifikan yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Secara teoritis faktor yang mempengaruhi kemiskinan kondisi spasial (X1), pendidikan kepala keluarga (X2), pendapatan kepala keluarga (X3), beban tanggungan rumah tangga (X4), aset keluarga (X5), partisipasi dalam masyarakat (X6), aksesibilitas (X7). Hubungan ketujuh variabel bebas dengan variabel kemiskinan akan dinyatakan dalam persamaan matematis adalah $Y = a + bX1 + bX2 + bX3 + bX4 + bX5 + bX6 + bX7$

Regresi adalah untuk mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung dan memprediksi variabel tergantung dengan menggunakan variabel bebas. Gujarati (2006) mendefinisikan analisis regresi sebagai kajian terhadap hubungan satu variabel yang disebut sebagai variabel yang diterangkan (the explained variabel) dengan satu atau dua variabel yang menerangkan (the explanatory). Variabel pertama disebut juga sebagai variabel tergantung dan variabel kedua disebut juga sebagai variabel bebas. Jika variabel bebas lebih dari satu, maka analisis regresi disebut regresi linear berganda. Disebut berganda karena pengaruh beberapa variabel bebas akan dikenakan kepada variabel tergantung.

II. KONSEP DAN TEORI KEMISKINAN

Kemiskinan sering dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Kekurangan dapat disebabkan karena keterbatasan penerimaan akibat keterlibatan dalam sektor usaha kurang produktif. Pendapatan yang diterima tidak mampu mengimbangi Bergeraknya laju pertumbuhan harga kebutuhan dasar hidup. Salah satu penyebab penduduk miskin terlibat dalam sektor kurang produktif adalah keterbatasan pendidikan. Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan keterbatasan pilihan sektor usaha yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Pernyataan diatas menunjukkan kemiskinan merupakan lingkaran yang sangat susah untuk dicari ujung pangkalnya karena satu dengan yang lain saling terkait. Butuh kekuatan eksternal dan komitmen internal untuk dapat keluar dari lingkaran kemiskinan. Menurut Chambers (Makmun, 2003) kemiskinan merupakan suatu fenomena multi face atau multidimensional. Kemiskinan adalah suatu integrated concept yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (proper); 2) ketidakberdayaan (powerless); 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (state of emergency); 4) ketergantungan (dependence), dan 5) keterasingan (isolation) baik secara geografis maupun sosiologis. Kemiskinan tidak hanya sebatas hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga menyangkut aspek yang lain seperti kesehatan, pendidikan, sosial, politik, hukum, kriminal, ketidakberdayaan menghadapi kekuasaan, dan ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri.

Kemiskinan menurut Chambers sebagai perangkap sehingga akan terus terperangkap dalam kemiskinan jika penduduk miskin tidak memiliki niat besar untuk melawan kondisi dan sentuhan tangan eksternal untuk membantu mengurai benang kusut kemiskinan. Menurut Lewis dalam teori budaya kemiskinan diungkapkan bahwa sifat yang dimiliki penduduk miskin antara lain menarik diri dari lingkungan sosial atau "minder" sehingga sangat susah untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Putnam (1996) menyatakan bahwa modal sosial adalah bagian dari kehidupan sosial. Terdapatnya jaringan, norma dan kepercayaan mendorong seseorang untuk bertindak bersama secara lebih efektif untuk mencapai tujuan bersama. Artinya dalam teori modal sosial jaringan sosial memiliki nilai dan kontak sosial yang mempengaruhi produktivitas individu dan kelompok. Untaian hubungan antar sesama, dan menjaganya agar terus berlangsung, memupuk agar orang mampu bekerja sama dalam mencapai tujuan. Gagasan inti dari teori modal sosial adalah bahwa jaringan sosial memiliki nilai, kontak sosial mempengaruhi produktivitas individu dan kelompok. (Field, 2014; 51). Teori modal sosial pada intinya dapat diringkas dalam dua kata soal hubungan. Membangun hubungan dengan sesama, dan menjaganya agar terus berlangsung sepanjang waktu, orang mampu bekerja sama untuk mencapai berbagai hal yang tidak dapat mereka lakukan sendirian, atau yang dapat mereka capai tapi dengan susah payah.

Setelah teridentifikasi faktor penyebab kemiskinan, kemiskinan itu sendiri dapat diklasifikasikan berdasarkan karakteristiknya sebagai berikut. Pertama, kemiskinan absolut, yaitu pemisahan kondisi ekonomi menjadi miskin dan tidak miskin dari pengeluaran atau pendapatannya. Asumsinya jika suatu masyarakat memiliki pengeluaran di atas rata-rata, berarti memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik, dan sebaliknya. Kemiskinan yang demikian disebut dengan kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut terjadi apabila pendapatannya di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kemiskinan ini diukur dengan menggunakan indikator tertentu yang bersifat universal dan dapat diperbandingkan antar ruang dan waktu. Dengan menggunakan garis penentu kemiskinan dapat dilihat tingkat keparahan kemiskinan yaitu perbandingan tingkat kesejahteraan antar penduduk miskin. Ukuran yang lain adalah tingkat kedalaman kemiskinan yang diukur dengan menghitung jarak rata-rata kesejahteraan penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

Kedua, kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan. Variasi pendapatan antar penduduk tersebut yang pada akhirnya digunakan untuk menentukan tingkat kemiskinan sehingga bersifat tentative dan tidak bisa diperbandingkan antar wilayah.

Ketiga, kemiskinan cultural, menurut Lewis faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar menyebabkan semakin parahnya tingkat kemiskinan atau dengan kata lain kemiskinan kemiskinan dapat disebabkan karena kemiskinan itu sendiri.

Keempat, kemiskinan struktural yakni situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu system sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan. Kebijakan penanggulangan kemiskinan terkadang justru semakin memperdalam tingkat kemiskinan, contoh kebijakan bantuan ekonomi kecil dan menengah dengan menerapkan berbagai persyaratan yang mustahil bisa dipenuhi oleh kelompok sasaran.

Dalam perkembangannya, menurut Jarnasy kemiskinan struktural dianggap lebih memiliki peran yang lebih penting dibandingkan jenis kemiskinan yang lain karena dapat menjadi penyebab tumbuh dan berkembangnya ketiga kemiskinan yang lainnya. Penduduk akan semakin miskin manakala kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dirumuskan tidak berpihak pada penduduk miskin, termasuk aspek lain yang tidak langsung berhubungan dengan kemiskinan juga dapat memperparah kemiskinan.

Selain empat hal di atas, kemiskinan juga dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu kemiskinan alamiah dan kemiskinan buatan (artificial). Kemiskinan alamiah terkait dengan kelangkaan sumber daya alam dan prasarana umum, serta keadaan tanah yang tandus. Keterisolasian wilayah yang berdampak pada keterbatasan akses pengembangan ekonomi mengakibatkan penduduk terjebak dalam kemiskinan. Kemiskinan ini lebih banyak terjadi pada daerah-daerah perdesaan dan terbelakang. Kemiskinan buatan lebih banyak diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang membuat masyarakat tidak dapat menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata.

Kemiskinan alamiah berbalikan dengan kemiskinan buatan, artinya perangkap kemiskinan disebabkan karena kondisi dan kualitas penduduk itu sendiri. Anak keluarga miskin akan lebih sulit keluar dari kemiskinan karena keterbatasan kemampuan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang dimiliki. Budaya kemiskinan seperti judi, main lotre, malas, mabuk-mabukan untuk menghilangkan stress dan sebagainya menurut Lewis dalam Suparlan (1984) merupakan budaya yang dimiliki oleh penduduk miskin sehingga perlu dukungan luar untuk keluar dari kemiskinan.

III. GAMBARAN DEMOGRAFI WILAYAH

Kondisi demografi sangat berpengaruh terhadap program kebijakan yang akan dirumuskan. Kondisi demografi di kedua wilayah kajian secara demografi memiliki perbedaan yang signifikan. Komposisi penduduk laki-laki dan perempuan yang disebut dengan rasio jenis kelamin menunjukkan bahwasannya di daerah perkotaan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Sebaliknya di daerah perdesaan, jumlah penduduk perempuan justru lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Ketersediaan fasilitas ekonomi tentu saja menjadi salah satu pertimbangan laki-laki di perkotaan tidak perlu melakukan migrasi keluar, sebaliknya keterbatasan yang muncul di daerah perdesaan menyebabkan laki-laki melakukan migrasi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga yang menjadi tanggungjawabnya.

Berdasarkan gambaran seks rasio ini, peningkatan partisipasi perempuan dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan perlu ditingkatkan dengan model yang berbeda disesuaikan dengan kemampuan seorang perempuan. Budaya yang memosisikan perempuan sebagai *konco wingking* masih tebal di daerah perdesaan menjadi tantangan tersendiri bagi pembuat kebijakan dalam menjalankan program-program yang harus menyertakan partisipasi masyarakat. Kondisi ini tentu saja tidak dijumpai di daerah perkotaan yang memiliki fasilitas sosial ekonomi yang lebih banyak sehingga modernisasi lebih terasa.

Tabel 1. Karakteristik Demografi Wilayah Kajian

Karakteristik	Perdesaan	Perkotaan
Seks rasio	98,79	102
Kepadatan penduduk	647	4063
Pertumbuhan penduduk	0,69	1,91

Sumber : Data primer, 2015

Fasilitas sosial ekonomi di perkotaan menjadi gula-gula bagi penduduk di daerah perdesaan untuk mengadu nasibnya. Migrasi sirkuler menjadi pilihan karena kedua wilayah ini tidak berbeda jauh dari sisi jarak. Keterbatasan sektor usaha yang mampu dimasuki juga menjadi pertimbangan pemilihan migrasi sirkuler. Daya tarik perkotaan dibandingkan perdesaan terlihat dari tingkat kepadatan penduduk yang jauh lebih tinggi di daerah perkotaan dibandingkan dengan perdesaan. Meskipun luas wilayah perdesaan sekitar dua kali dari wilayah perkotaan, namun jumlah penduduk di perkotaan 6 kali lipat jumlah penduduk di perdesaan. Hal ini menunjukkan tingkat pertumbuhan penduduk di perkotaan memang lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan.

Terdapat tiga aspek yang memengaruhi pertumbuhan penduduk yaitu kelahiran, kematian dan migrasi. Pertumbuhan penduduk akan positif ketika angka kelahiran lebih tinggi dibandingkan angka kematian dan didukung oleh angka migrasi masuk lebih tinggi dibandingkan dengan migrasi keluar. Angka pertumbuhan juga akan positif meskipun angka kelahiran rendah ketika angka migrasi masuk lebih tinggi dibandingkan dengan migrasi keluar dan lebih besar dibandingkan dengan angka kelahiran. Meskipun angka migrasi masuk tinggi namun jika angka kematian suatu wilayah tinggi maka angka pertumbuhan pendudukpun akan negatif atau rendah. Daerah perdesaan dengan fasilitas sosial ekonomi yang kurang inilah yang mampu digunakan untuk menjelaskan bahwa angka kelahiran menjadi faktor utama pertumbuhan penduduk di daerah tersebut. Sementara itu, angka pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan lebih disebabkan karena angka migrasi..

IV. POTENSI KELUARGA MISKIN

Umur kepala keluarga dibedakan menjadi usia produktif yaitu 20-60 tahun dan usia lanjut yaitu diatas 60 tahun. Pembedaan umur dalam dua kelas penting mengingat program pembangunan penanggulangan kemiskinan memiliki beberapa sasaran yang berbeda menurut umur. Umur kepala keluarga di kedua daerah penelitian tidak menunjukkan perbedaan. Usia produktif merupakan potensi bagi keluarga miskin untuk keluar dari kemiskinan. Dalam hal ini di kedua wilayah memungkinkan untuk diselenggarakannya program penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan tenaga seperti program pembangunan wilayah. Selain itu, pengembangan program peningkatan usaha produktif masih relevan karena dalam range usia tersebut fisik dan kemampuan berpikir kepala keluarga bisa diandalkan.

Tabel 2. Distribusi Kepala Keluarga menurut Umur

Umur (tahun)	Daerah Perdesaan		Daerah Perkotaan	
	f	%	f	%
< 34	10	7,4	5	7,2
35-39	21	15,6	7	13,5
40-44	17	12,6	14	15,0
45-49	14	10,4	10	11,6
50-54	20	14,8	6	12,6
55-59	13	9,6	7	9,7
60-64	20	14,8	7	13,0
65 +	20	14,8	16	17,4
Total	135	100	72	100

Sumber: Data Primer, 2015

Umur akan menjadi sebuah potensi jika didukung dengan pendidikan yang memadai, artinya dengan pendidikan kepala keluarga memiliki kemampuan untuk mengembangkan beberapa alternatif perbaikan kehidupan. Tingkat pendidikan kepala keluarga di kedua daerah penelitian relatif sama yaitu didominasi pendidikan Sekolah Dasar. Rendahnya tingkat pendidikan kepala keluarga ini disebabkan karena motivasi dan ketersediaan sarana dan pra sarana pendidikan ketika itu belum memadai. Satu hal yang perlu diingat bahwasannya wilayah perdesaan dalam lima belas tahun yang lalu, sarana dan prasarana transportasi sangat kurang sehingga motivasi warga untuk mengembangkan pendidikan rendah. Jarak tempuh tempat tinggal ke sarana pendidikan sekolah menengah pertama cukup jauh. Namun demikian, akhir-akhir ini transportasi pribadi menjadi aset yang sangat terjangkau untuk dimiliki. Beberapa penyedia layanan transportasi pribadi memberikan beberapa kemudahan sistem kredit.

Tabel 3. Distribusi Kepala Keluarga menurut Pendidikan

Pendidikan	Daerah Perdesaan		Daerah Perkotaan	
	f	%	F	%
SD	101	74,8	53	73,6
SMP	30	22,2	15	20,8
SMA	4	3,0	4	5,6
Total	135	100	72	100

Sumber: Data Primer, 2015

Berdasarkan tabel 3 tersebut, potensi pengembangan sumberdaya manusia di daerah ini perlu mendapatkan perhatian. Pendidikan yang dimaksud terkait dengan pengembangan potensi keluarga miskin tentunya yang bersifat informal artinya pendidikan yang bertujuan peningkatan kemampuan sehingga keluarga miskin mampu berpikir kritis dan kreatif mengembangkan peluang-peluang pasar. Pemberian ketrampilan aplikatif salah satu solusi program penanggulangan kemiskinan untuk meningkatkan peluang-peluang ekonomi yang dapat dikembangkan. Lebih dari 50 persen kepala

keluarga bekerja pada sektor jasa. Bisa dipastikan sektor jasa yang dikembangkan bersifat tidak terampil karena rendahnya tingkat pendidikan seperti yang terlihat dalam tabel sebelumnya.

Tabel 4. Distribusi Kepala Keluarga menurut Lapangan Pekerjaan

Lapangan pekerjaan	Daerah Perdesaan		Daerah Pegunungan	
	f	%	f	%
Pertanian	27	20,8	19	27,5
Jasa	68	52,3	35	50,7
Industri rumah tangga	35	26,9	15	21,7
Total	130	100	69	100

Sumber: Data Primer, 2015

Tabel 4 menunjukkan bahwa daerah penelitian kurang tepat untuk pengembangan usaha pertanian. Ketersediaan air yang kurang dan solum tanah yang tipis tidak memungkinkan dikembangkan sektor pertanian persawahan. Padi yang dikembangkan merupakan jenis padi tadah hujan artinya pola tanam padi hanya mungkin dilakukan pada waktu musim hujan, ketika musim kemarau tiba tanah yang ada ditanami tanaman menahun atau palawija dengan kebutuhan air tidak banyak.

Terdapat kepala keluarga yang bekerja pada sektor industri rumah tangga seperti pengrajin bambu. Pekerjaan ini dilakukan pada waktu luang dimana sektor pertanian sedang tidak berproduksi sedangkan tawaran bekerja menjadi buruh tidak ada. Beberapa isteri dan anggota keluarga juga terlibat dalam industri keluarga sebagai tenaga kerja tidak dibayar. Namun demikian terdapat juga sebagai buruh industri rumah tangga, artinya bahan baku diperoleh dari majikan dan keluarga miskin sebagai tenaga yang merubah bahan baku menjadi bahan jadi seperti tikar, tampah dan hasil kerajinan bambu yang lain.

Potensi ekonomi yang dimaksud dalam tulisan ini adalah kemampuan ekonomi yang dimiliki oleh keluarga miskin. Potensi ini sebagai bantalan sosial atau asuransi ketika keluarga miskin mengalami gangguan ekonomi seperti gagal panen, krisis ekonomi, dan lain sebagainya. Keluarga miskin yang memiliki investasi, ketika keluarga miskin mengalami gangguan ekonomi tidak akan terpuruk, namun sebaliknya keluarga yang tidak memiliki aset ekonomi akan terpuruk dan membutuhkan bantuan yang bersifat charity untuk sekedar bertahan hidup. Potensi ekonomi dapat berupa aset tanah, tabungan uang, maupun perhiasan.

Tabel 5 menunjukkan terdapat perbedaan nilai aset menurut status daerah. Daerah perdesaan memiliki rata-rata aset lebih tinggi yaitu 35 juta, sementara rata-rata aset yang dimiliki oleh keluarga di daerah perkotaan sebesar 43 juta rupiah. Perbedaan total aset ini dikarenakan variasi aset yang dikembangkan di daerah perkotaan lebih banyak dibandingkan daerah perdesaan. Seandainya jenis asetnya sama, nilai aset yang diinvestasikan akan berbeda. Perbedaan komponen aset disajikan dalam tabel 5.

Nilai tanah di daerah perdesaan berbeda dengan di daerah perkotaan yang relatif mudah aksesibilitasnya. Tabel tersebut menunjukkan perbedaan nilai jual tanah yang cukup besar diantara kedua wilayah tersebut. Satu hal yang perlu diperhatikan nilai jual tanah yang dimaksud dalam kajian ini termasuk tanah yang ditempati untuk bangunan rumah atau dengan kata lain, tidak mungkin

dijual ketika keluarga ini mengalami gangguan ekonomi. Investasi yang lain yaitu barang elektronik, perhiasan, dan uang relatif sama.

Tabel 5. Potensi Nilai Rata-rata Aset Keluarga Miskin

Jenis aset ekonomi	Daerah Perdesaan	Daerah Perkotaan
Nilai jual tanah	26.600.000	32.071.000
Nilai jual tanaman	1.755.700	2.755.150
Nilai jual ternak	1.706.500	1.907.300
Nilai jual barang elektronik	4.157.300	5.367.592
Nilai jual perhiasan	211.597	176.880
Nilai tabungan	430.550	358.520

Sumber: data primer, 2015

Kesadaran keluarga miskin memiliki tabungan baik berupa barang maupun uang ditunjukkan dari nilai tabungan perhiasan dan uang. Kondisi ini cukup menarik, pertama, keluarga miskin mampu melakukan perencanaan kebutuhan dengan menyisihkan sebagian pendapatan dalam bentuk uang atau tabungan. Kedua, tingkat kemiskinan yang ada tidak sampai menyentuh pada level fakir miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar pangannya. Kondisi ini disebabkan karena biaya hidup murah, kebutuhan pangan subsisten dan gaya hidup hemat beberapa hal yang dapat digunakan untuk menjelaskan kemampuan saving yang dilakukan keluarga miskin.

Potensi sosial yang dimaksud adalah keterlibatan keluarga miskin dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Menurut Robert Chambers, keluarga miskin memiliki sifat marik diri dari kehidupan sosial kemasyarakatan karena rendah diri. Kondisi inilah yang dijadikan sebagai kambing hitam ketika keluarga miskin tidak mendapatkan bantuan program penanggulangan kemiskinan yang memadai. Keadaan ini semakin parah ketika jenis kemiskinan yang ada bersifat struktural yaitu ketidakadilan yang diciptakan oleh pejabat pemerintah ataupun tokoh-tokoh ekonomi masyarakat. Artinya, kemiskinan semakin parah manakala kebijakan-kebijakan yang ada tidak pro kepada orang miskin atau orang miskin tidak pernah diberi kesempatan untuk mengungkapkan permasalahan. Contoh kebijakan penentuan harga buruh tani lebih banyak ditentukan antara pemilik tanah karena buruh tani meskipun hadir dalam rapat namun tidak memiliki keberanian untuk menyatakan pendapat. Ketergantungan dengan pemilik tanah masih menjadi tabir tebal.

Tabel 6. Rata-rata Besar Bantuan yang diterima Keluarga Miskin

Jenis Bantuan	Daerah Perdesaan		Daerah Perkotaan	
	nilai	N	nilai	N
Beras	5.000	91	6.000	71
Pendidikan	200.000	15	125.000	10
Ekonomi produktif	1.000.000	3	1.000.000	7
MCK	750.000	2	0	
Lainnya	600.000	10	600.000	6

Sumber: data primer, 2015

Tabel 6 menunjukkan bahwa tidak semua keluarga miskin di daerah perdesaan adalah penerima bantuan beras miskin. Hal ini melengkapi hasil penelitian selama ini yang menyatakan bahwa

program penanggulangan kemiskinan termasuk beras miskin tidak tepat sasaran. Sementara itu, kategori kemiskinan yang digunakan dalam kajian ini adalah penerima beras miskin yang tercatat pada kepala dusun. Jika keluarga yang menyatakan tidak menerima raskin kurang dari 5 persen, keluarga menyembunyikan informasi dapat diterima. Namun ketika jumlahnya sekitar 25 persen dapat disimpulkan ketidaktepatan sasaran program. Ironisnya, beras miskin merupakan bantuan yang cenderung di bagi bersama keluarga miskin lain yang tidak masuk kategori miskin. Tabel 3.5 dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena tersebut dari nilai raskin yang dibayarkan. Berikut ini ungkapan dari kepala RT terkait dengan kebijakan beras dibagi rata.

"kondisi ekonomi masyarakat sini hampir sama, tapi pemerintah memiliki cara sendiri untuk melihat kemiskinan. Kita sudah musyawarah karena yang dapat bantuan tidak sebanyak keluarga yang ada akhirnya disepakati bantuan tersebut diberikan antara 5-8 kg. Keluarga yang dapat 8 kg itu yang memang miskin sekali dan tidak memiliki sumber pendapatan, tapi jika yang masih ada KK yang muda kita beri 5 kg. Memang tidak tepat jumlah ya... tapi ya bagaimana lagi, kami yang membagi ini adanya cuma bingung dan bingung"

Tabel tersebut juga menggambarkan variasi bantuan yang diterima keluarga miskin. Bantuan pendidikan, ekonomi produktif, kesehatan, fasilitas rumah seperti MCK dan lain sebagainya. Pemberi bantuan pada umumnya dari pemerintah, meskipun terdapat pula sumber-sumber bantuan dari pihak swasta dan masyarakat. Sumber bantuan dari pihak non pemerintah tidak bersifat tetap, bantuan diberikan pada waktu-waktu khusus saja dengan sasaran program yang kurang jelas pula. Jenis bantuan yang diberikan oleh lembaga non pemerintah dan masyarakat adalah kebutuhan pokok.

V. ALTERNATIF PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Populasi penelitian ini adalah keluarga miskin penerima beras miskin. Penelitian ini mewawancarai semua keluarga miskin yang menjadi populasi penelitian atau sensus. Namun demikian dalam proses pengumpulan data tidak semua populasi berhasil diwawancarai karena tidak berada di tempat hingga penelitian ini selesai. Pertimbangan digunakan penerima beras miskin sebagai data dasar responden adalah pertimbangan teknis yaitu update informasi keluarga miskin dan ketersediaan data pada tingkat dusun.

Pembahasan berikut ini difokuskan pada tingkat kemiskinan yang diukur dengan menggunakan ukuran obyektif yaitu pengeluaran dan pendapatan keluarga. Pembahasan meliputi proporsi pengeluaran pangan dan non pangan, dan pendapatan perkapita. Selain itu juga dibahas kemiskinan subyektif yaitu persepsi kondisi sosial ekonomi keluarga menurut kepala keluarga dibandingkan dengan keluarga-keluarga disekitar tempat tinggal. `Proporsi pengeluaran pangan digunakan sebagai indikator kemiskinan karena untuk mengetahui tingkat keparahan kemiskinan keluarga. Asumsi yang dibangun adalah ketika proporsi pengeluaran pangan keluarga lebih besar dari 50 persen, maka kehidupan keluarga tersebut masih terkonsentrasi pada pemenuhan kebutuhan dasar yaitu pangan. Kondisi ini menggambarkan rendahnya investasi yang dilakukan keluarga tersebut untuk kebutuhan non pangan berupa pendidikan dan kesehatan. Sementara pada sisi yang lain, pendidikan dan kesehatan merupakan syarat dasar pembangunan sumber daya manusia menyongsong era globalisasi.

Berdasarkan data-data yang disajikan menunjukkan bahwa keluarga miskin di kedua wilayah penelitian tidak menunjukkan perbedaan tingkat kemiskinan atau keluarga miskin dalam tahapan pemenuhan kebutuhan pangan. Rata-rata proporsi pengeluaran pangan mencapai 67 persen artinya

pengeluaran rumah tangga masih terfokus untuk memenuhi kebutuhan pangan, sedangkan kebutuhan non pangan terpenuhi sekitar 33 persen. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kualitas pangan keluarga miskin? Apakah masih terfokus pada pangan karbohidrat atau sudah mengalami pergeseran untuk pemenuhan gizi anak seperti protein dan vitamin? Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan beberapa keluarga miskin disimpulkan bahwasannya untuk memenuhi kebutuhan pangan tiga kali keluarga miskin tidak mengalami kesulitan. Permasalahan muncul ketika pemenuhan kebutuhan pangan dituntut 4 sehat 5 sempurna. Susu, daging, dan ayam merupakan kebutuhan pangan yang jarang dikonsumsi. Pemenuhan kebutuhan lauk bersifat sederhana yaitu tahu, tempe, krupuk dan telur. Strategi yang dilakukan keluarga untuk pemenuhan kebutuhan pangan bergizi seperti yang diungkapkan salah satu keluarga miskin.

"kalau hanya makan, insyaallah kita tidak kekurangan, tinggal ambil saja dipekarangan. Biasanya saya dan bapaknya mengalah untuk makan yang amis-amis. Kalau beli ayam ya yang penting anak-anak, kalau kita orang tua cukup ada cabai dan garam saja. Susu, tidak pernah karena anak-anak saya tidak suka, katanya amis"

Seorang nenek yang tinggal sendiri dengan rumah bambu

" kalau untuk makan ya cukup kadang diberi tetangga-tetangga, seadanya. Saya makan paling sehari satu atau dua kali cukup. Bantuan beras cukup untuk makan sehari-hari, sedang sayurnya nanam sendiri, yang harus beli garam dan lauk

Hasil wawancara menunjukkan untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat untuk beberapa keluarga cukup apalagi dengan adanya bantuan beras miskin. Namun demikian bagaimana dengan keluarga yang memiliki anggota rumah tangga lebih dari 3 sementara itu basis bantuan beras miskin adalah rumah tangga. Persoalan semakin parah ketika bantuan beras miskin tidak diterimakan 20 kg per keluarga miskin namun dibagi dengan keluarga miskin lain yang tidak mendapatkan bantuan dan merasa kondisi ekonominya tidak jauh berbeda.

Tabel 7 Proporsi Pengeluaran Pangan menurut Wilayah

Proporsi Pengeluaran Pangan	Daerah Perdesaan		Daerah Perkotaan	
	f	%	f	%
< 25	7	5,2	3	4,2
25 – 50	7	5,2	8	11,1
> 50	121	89,6	61	84,7
Total	135	100	72	100

Sumber: Data Primer, 2015

Persoalan pangan pada keluarga miskin masih seputar kualitas pangan yaitu pemenuhan protein hewani. Kebijakan mantan Bupati Bantul "Babonisasi" menurut warga dianggap program yang tepat karena keluarga tidak diperkenankan menjual ayam dan telurnya. Telur ayam menjadi hak anak-anak untuk dikonsumsi sehingga secara tidak langsung kebutuhan protein hewani anak menjadi terpenuhi.

"tuk kebutuhan lauk (kolo-kolo) diambil dari telur ayam bantuan Pak Idham dulu. Alhamdulillah sekarang ayamnya sudah banyak, ada yang saya jual untuk kebutuhan keluarga, tapi karena sudah diwanti-wanti telurnya tidak boleh dijual ya ada beberapa babon yang saya tinggal. Kemarin lebaran juga saya sembelih, jagonya"

Keluarga dengan rata-rata pengeluaran pangan kurang dari 25 persen pada umumnya adalah keluarga kecil dengan anggota rumah tangga 2-3 orang. Keluarga tersebut pada umumnya menggantungkan hidup pada sektor industri dan istri turut berpartisipasi secara ekonomi. Sebagian besar memiliki alat transportasi sendiri. Terdapat 73 persen keluarga dengan pengeluaran pangan 25-50 persen sebagai penerima raskin. Rata-rata pendapatan rumah tangga kelompok ini 1,2 juta per bulan dengan rata-rata jumlah anggota keluarga 3 orang atau dengan kata lain rata-rata pendapatan perkapita 400.000 per bulan.

Berdasarkan kondisi tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasannya proporsi pengeluaran pangan merupakan indikator kemiskinan yang cukup kasar karena sangat ditentukan oleh karakteristik anggota keluarga, mata pencaharian keluarga, dan status tempat tinggal perdesaan atau perkotaan. Keluarga perdesaan biasa dengan pemanfaatan lahan pekarangan dengan sayur-sayuran, buah-buahan, dan tanaman karbohidrat seperti ketela pohon. Rendahnya proporsi pengeluaran pangan juga belum tentu dialihkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan, namun terkadang dialihkan untuk kebutuhan sosial seperti menyumbang, arisan, dan membantu anak. Indikator proporsi pengeluaran pangan ketika digunakan untuk menentukan status ekonomi keluarga perlu memperhatikan karakteristik dan potensi ekonominya.

Berikut ini membahas tentang rata-rata pengeluaran non pangan per bulan. Tabel menunjukkan bahwasannya rata-rata pengeluaran untuk kesehatan mendominasi pengeluaran non pangan. Rata-rata pengeluaran kesehatan di daerah dataran dua kali lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pengeluaran di daerah perdesaan. Kondisi ini bisa menggambarkan kesadaran pemeliharaan kesehatan lebih baik di daerah perkotaan. Hal ini dengan asumsi sanitasi kesehatan di kedua daerah ini tidak menunjukkan perbedaan. Perbedaan muncul ketika dilihat dari keterjangkauan dalam pengertian jarak menuju fasilitas kesehatan.

Bantuan kesehatan berbasis keluarga, artinya ketika keluarga masuk dalam kategori miskin maka semua anggota keluarga tersebut dapat mengakses bantuan kesehatan. Bantuan kesehatan ini sangat bermanfaat ketika sakit yang dialami keluarga miskin bersifat sederhana dan dapat diselesaikan pada tingkat Puskesmas. Ketika sakit tersebut membutuhkan tindakan lebih lanjut seperti operasi, perlu dipertanyakan kesanggupan keluarga miskin untuk menyembuhkannya.

Tabel 8. Rata-Rata Pengeluaran Non Pangan menurut Wilayah

Pengeluaran Non Pangan	Daerah Perdesaan	Daerah Perkotaan
Pendidikan	74.000	58.600
Kesehatan	160.800	347.500
Listrik	49.000	47.000
Komunikasi	41.600	50.000
Bahan bakar	110.000	113.000

Sumber: Data Primer, 2015

Berikut ini merupakan salah satu ungkapan keluarga miskin terkait dengan pengeluaran kesehatan.

"kalau hanya berobat ke puskesmas, kami sanggup. Kami kesulitan ketika harus operasi ataupun rawat inap ke kabupaten atau rumah sakit besar karena mesti ada beberapa biaya yang tidak bisa dimintakan pada pemerintah, belum angkutannya untuk kesana kemari".

"kalau sakit ya lihat-lihat sakitnya. Umumnya pada awalnya saya obati dengan obat-obat warung, lha kalau tidak sembuh-sembuh baru saya bawa ke puskesmas. Kalau cuma puskesmas ya mampu bayar karena semua digratiskan hanya bayar pendaftaran saja, tapi ya itu kalau sudah parah harus ke rumah sakit nah..... baru mikir bayarnya"

Bantuan kesehatan memang tidak bisa mengcover semua biaya yang ditimbulkan karena sakit, namun demikian bantuan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah dirasakan sangat membantu. Harapan yang diungkapkan adalah covered biaya yang lebih luas utamanya terkait dengan tindakan lanjut. Beberapa keluarga miskin menyatakan justru kondisi keluarga miskin semakin miskin ketika terdapat anggota keluarga yang sakit. Kesehatan memang dianggap sebagai variabel penting terkait dengan semakin memburuknya kondisi ekonomi sebuah keluarga. Berikut ini diungkapkan oleh salah seorang keluarga non miskin terkait dengan biaya kesehatan.

" menurut saya yang harus mendapatkan bantuan kesehatan tidak hanya keluarga miskin tetapi keluarga yang hampir miskin juga perlu diperhatikan. Saya ini tidak masuk kategori miskin karena saya PNS, padahal saya hanya tukang jaga sekolah dengan beban anggota keluarga 4. Tapi ya saya tetap merasa beryukur karena dianggap lebih baik dari yang lain. Saya dulu punya orang tua yang stroke, berbagai cara sudah saya lakukan mulai dari dokter hingga alternatif, tapi hasilnya yang tidak ada perubahan. Saya tidak bisa mendapatkan bantuan karena saya tidak mau menggunakan SKTM tapi ya akhirnya semua saya jual, sawah hilang. Akhirnya orang tua saya meninggal tetapi ya saya sudah habis-habisan.... tapi ya saya tidak menyesal karena untuk orang tua. Saya cuma ingin bilang karena kesehatan orang yang tidak miskin pun bisa jatuh miskin, apalagi yang sudah miskin".

Selain kesehatan, pengeluaran non pangan kedua terbanyak adalah untuk kebutuhan bahan bakar terutama untuk transportasi selain untuk minyak dan gas. Transportasi pribadi menjadi satu kebutuhan keluarga karena lokasi tempat tinggal sebagai wilayah bergelombang. Besar pengeluaran bahan bakar untuk transportasi ini jauh lebih murah ketika keluarga miskin menggunakan transportasi umum. Berikut ungkapan dari salah satu kepala keluarga.

"kami memiliki dua sepeda motor, meskipun tidak baru. Sepeda motor yang satu saya pakai untuk bekerja, buruh bangunan. Sepeda yang satu dipakai isteri saya untuk mengantar sekolah anak dan isteri saya jualan sayuran keliling. Kalau anak saya naik angkutan umum jatuhnya lebih boros, belum waktunya tidak bisa dipastikan, anak-anak bisa terlambat. Ibaratnya 1 liter bisa untuk antar dan jemput dua anak saya yang sekolahnya beda (SD dan SMP). Jadi, sepeda motor ini memang saya butuhkan bukan untuk pameran-pameran, apa yang akan dipamerkan mas sepeda motor butut gitu kok, maling saja ndak mau".

Transportasi dalam hal ini memang harus dimaknai secara bijak. Kepemilikan transportasi sebagai barang konsumsi untuk bersenang-senang atau sebagai barang produksi sebagai sarana mendukung kegiatannya. Jika transportasi sebagai sarana produksi, maka keluarga yang masuk dalam kategori ini bisa juga dimasukkan dalam kriteria keluarga miskin selama indikator yang lain dapat digunakan untuk menjelaskannya.

Pengeluaran bahan bakar yang lain adalah untuk gas atau kayu bakar. Rata-rata keluarga miskin di daerah penelitian tidak menggunakan gas untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya. Kayu

bakar didapatkan dari mencari di sekitar tempat tinggal atau dalam waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan yang banyak, harus membeli di pasar. Penggunaan kayu bakar ini menggantikan fungsi gas yang digunakan pada saat-saat tertentu saja. Kekhawatiran penggunaan gas dan disisi yang lain ketersediaan kayu yang melimpah menjadi faktor penjas kondisi tersebut.

Pendidikan merupakan pengeluaran non pangan ketiga yang dikeluarkan oleh keluarga miskin. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sangat efektif untuk mendukung kegiatan pendidikan. Beberapa keluarga menyatakan tidak ada pungutan sedikit pun terkait dengan penyelenggaraan sekolah. Munculnya pengeluaran sekolah karena biaya lain untuk mendukung kegiatan sekolah seperti fotokopi lembar kerja siswa (LKS), uang saku, uang transportasi, dan uang buku pendukung jika dibutuhkan. Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan telah memfasilitasi buku panduan pendidikan setiap mata pelajaran secara gratis. Namun demikian, sifatnya yang turun temurun maka buku tersebut sangat tidak layak untuk dibaca seperti bau, warna sudah jelek, sobek, dan banyak coretan-coretan sehingga anak harus fotokopi sendiri.

Komunikasi untuk saat ini merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Pemilikan Handphone menjadi sebuah kebutuhan, dan tidak terkecuali keluarga miskin. *Handphone* disamping sebagai alat untuk komunikasi juga sebagai alat untuk usaha produksi. Beberapa keluarga menggunakan HP untuk mendukung usaha ekonomi terutama dilakukan oleh anak-anak. Kegiatan bisnis yang biasa dikembangkan adalah jual beli HP secara online, usaha jemputan secara online, pemasaran produk, dan lain sebagainya. Usaha ini disambut baik oleh provider dengan memberikan penawaran pulsa dengan mudah dan murah. Kondisi inilah yang merangsang orang untuk melakukan kegiatan-kegiatan inovatif dan kreatif melihat peluang usaha. Berikut ini ungkapan dari salah seorang anak dari keluarga miskin.

"hobby saya melukis, sehingga saya kerjasama dengan teman-teman saya mendirikan usaha sablon. Saya bagian gambar sedangkan teman-teman yang nyablon. Karena kami sedang sekolah, usaha ini hanya dilakukan pada waktu hari minggu atau libur sekolah"

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwasannya keluarga miskin masih mengeluarkan biaya-biaya pendidikan dan kesehatan, disamping biaya bahan bakar, komunikasi, dan listrik. Biaya-biaya tersebut terkadang melebihi besaran bantuan yang diberikan pemerintah. Namun demikian, semua keluarga miskin menyatakan bantuan yang diberikan pemerintah sangat bermanfaat dan bisa membantu keluarga miskin menyelesaikan persoalan rumah tangga terkait biaya-biaya tersebut.

Berdasarkan proporsi pengeluaran pangan, tingkat kemiskinan keluarga di kedua dusun ini tidak menunjukkan perbedaan. Namun demikian jika dilihat dari kondisi tempat tinggal menunjukkan perbedaan yang cukup nyata. Jenis rumah di daerah datar lebih permanen dengan dinding dari tembok, lantai rumah diperkeras. Sebaliknya rumah yang ada di daerah perdesaan non permanen dengan dinding rumah kayu dan beberapa lantai belum diperkeras.

Faktor yang mempengaruhi kemiskinan di kedua wilayah ini berbeda. Faktor individu seperti pendidikan kepala keluarga, jumlah anggota keluarga, pendapatan kepala keluarga dari sektor non pertanian, dan jenis kelamin kepala keluarga menjadi faktor yang signifikan mempengaruhi kemiskinan. Model regresi diterima sebesar 60 persen dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = 87,3 - 2,2 X_1 - 3,7X_2 - 7,6 X_3 + 7,2 X_4$$

Y = kemiskinan

X₁ = pendidikan KK

X₂ = beban tanggungan rumah tangga

X₃ = pendapatan KK sektor non pertanian

X₄ = jenis kelamin KK

Secara lebih detail analisis tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendidikan kepala keluarga berpengaruh terhadap kemiskinan, kepala keluarga dengan pendidikan tinggi memiliki tingkat ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan kepala keluarga dengan pendidikan rendah
2. Keluarga dengan beban tanggungan yang lebih besar memiliki kondisi ekonomi lebih buruk dibandingkan dengan keluarga dengan beban ekonomi lebih sedikit
3. Kepala keluarga dengan pendapatan non pertanian lebih tinggi memiliki tingkat ekonomi lebih baik. Hal ini dapat diartikan kepala keluarga memiliki pekerjaan sampingan selain pekerjaan pertanian sebagai pekerjaan utamanya
4. Kepala keluarga laki-laki memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan kepala keluarga perempuan.

Berikut ini adalah persamaan regresi faktor yang mempengaruhi kemiskinan pada daerah dataran. Penerimaan model faktor yang mempengaruhi kemiskinan di daerah tersebut 47 persen. Faktor yang mempengaruhi adalah kepemilikan sarana transportasi, nilai jual tanah, dan aksesibilitas ke kantor pemerintahan desa. Persamaan regresinya adalah:

$$Y = 72.32 - 0.3 X_1 - 0,0025 X_2 + 6,2 X_3$$

Y = kemiskinan

X₁ = aksesibilitas ke kantor desa

X₂ = nilai jual tanah

X₃ = kepemilikan transportasi

Kesimpulan yang dapat diambil dari model tersebut adalah:

1. Keluarga yang memiliki akses ke kantor desa memiliki tingkat ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan yang tidak memiliki akses
2. Nilai jual tanah yang semakin tinggi akan menurunkan angka kemiskinan
3. Keluarga yang memiliki sarana transportasi akan memiliki kondisi ekonomi lebih baik dibandingkan dengan yang tidak memiliki

Berdasarkan dua persamaan regresi ini dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasannya Faktor yang mempengaruhi kemiskinan di daerah perdesaan lebih bersifat individu, sementara faktor yang mempengaruhi kemiskinan di daerah perkotaan terkait dengan aksesibilitas. Artinya faktor individu sangat menentukan kreativitas dan inovasi yang dilakukan di daerah perdesaan. Hal ini karena interaksi mereka dengan faktor eksternal tidak intensif. Sedangkan kemiskinan di daerah dataran dipengaruhi

oleh faktor eksternal seperti nilai jual tanah. Keluarga yang memiliki akses tanah luas akan memiliki kondisi yang lebih baik karena nilai jual tanah tinggi. Sementara itu, pemilikan lahan yang luas di daerah perdesaan tidak berdampak pada kondisi ekonomi karena nilai jual tanah rendah. Perbedaan determinan kemiskinan ini tentu saja akan berdampak pada perbedaan model program pengentasan kemiskinan antar dua wilayah ini.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bantul secara umum untuk menanggulangi jumlah penduduk miskin beragam. Jenis program berdasarkan unit sasaran dibedakan menjadi:

1. Program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga

Beberapa program yang dilakukan dengan basis keluarga antara lain:

- a. Bantuan pangan dan sandang meliputi penurunan angka kekurangan gizi pada balita, peningkatan kecukupan sandang dan pangan dengan kalori dan gizi bagi keluarga miskin, peningkatan jumlah penduduk miskin yang memiliki akses terhadap air bersih dan jamban keluarga.
- b. Bantuan kesehatan sebagai sebuah program yang bertujuan untuk penurunan angka kematian ibu karena melahirkan, kematian bayi, kematian anak, penurunan balita gizi kurang dan buruk, penurunan angka kesakitan atau keluhan sakit, peningkatan alokasi dana jaminan kesehatan daerah, dan peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan.
- c. Bantuan pendidikan meliputi peningkatan angka partisipasi sekolah menengah atas bagi anak-anak dari keluarga miskin, penurunan buta aksara, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dasar, peningkatan kejar paket A, kejar paket B, dan kejar paket C, pembebasan biaya pendidikan keluarga miskin untuk jenjang pendidikan menengah, pembebasan biaya pendidikan dasar dan menengah
- d. Bantuan perumahan dilakukan dengan memberikan bantuan perbaikan rumah dan sarana/prasarana permukiman.

2. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah:

- a. Pelatihan-pelatihan ketrampilan
- b. Bimbingan pengelolaan usaha atau manajemen
- c. Fasilitasi partisipasi masyarakat
- d. Pengorganisasian relawan penanggulangan kemiskinan
- e. Pengelolaan usaha kelompok
- f. Kemitraan pemerintah dan swasta

3. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.

Kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan permodalan gakin
- b. Perluasan akses pinjaman modal murah bagi gakin
- c. Pemberian pinjaman dana bergulir
- d. Peningkatan sarana dan prasarana usaha

Program-program tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu penanggulangan kemiskinan yang diukur dengan:

- a. Berkurangnya beban pengeluaran keluarga miskin
- b. Meningkatnya kemampuan dan pendapatan warga miskin
- c. Adanya perkembangan dan jaminan keberlanjutan usaha mikro dan kecil
- d. Jumlah warga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan dasar, dan
- e. Sinergitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan atas lembaga atau instansi yang memiliki program penanggulangan kemiskinan

Beberapa program yang dilakukan tersebut tidak luput dari beberapa masalah sehingga evaluasi program senantiasa dilakukan. Contoh yang dapat diberikan dalam kajian ini adalah bantuan pendidikan BSM (Bantuan Siswa Miskin). Level sasaran program ini adalah individu dengan ukuran kepandaian akademik dan kemampuan ekonomi keluarga. Diantara besar bantuan BSM yang diterima kelompok sasaran, ternyata bantuan tersebut hanya menutupi 30 persen dari biaya pendidikan. Persoalan ketepatan sasaran menjadi kendala penyaluran program BSM. Bantuan ini pada jenjang SD dan SMP hanya mampu menjangkau rumah tangga miskin dan rentan dengan anak usia SD sebanyak 4 persen. Sedangkan tingkat dan cakupan BSM untuk rumah tangga dengan anak usia SMA bahkan lebih rendah kurang dari 2 persen.

Program kemiskinan perlu memperhatikan kondisi geografis terutama ketika dihubungkan dengan akses dan pemasaran. Selain itu perlu memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lain. Pembangunan infrastruktur perdesaan sebagian besar digunakan untuk pembangunan jalan. Pembangunan fisik merupakan program yang lebih mudah terukur. Namun demikian pertanyaannya kemudian adalah siapa yang menggunakan jalan tersebut? Seberapa banyak keluarga miskin terbantu dengan jalan tersebut? Sejauh mana roda ekonomi berputar dan menguntungkan keluarga miskin. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah pembangunan jalan menguntungkan keluarga miskin untuk mengembangkan potensinya sehingga keluarga miskin memiliki banyak alternatif-alternatif pekerjaan. Matrik karakteristik keluarga miskin dan program yang mungkin dikembangkan tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 9 Matrik Karakteristik, Potensi, dan Program Penanggulangan Kemiskinan

Jenis kriteria	Daerah perdesaan	Daerah dataran
Potensi demografi		
Umur KK	51 tahun	52 tahun
Pendidikan KK	SD	SD
Pekerjaan KK	Sosial	Sosial
Jumlah anggota rumah tangga	Sedikit (2-3 orang)	Banyak (3 orang)
Potensi ekonomi		
Rata-rata pendapatan	1.588.700	1.161.800
Rata-rata pengeluaran	1.083.000	1.229.447
Aset	42.636.960	34.865.800

Potensi sosial	Partisipasi sosial berjalan Keterlibatan swasta dan swadaya masyarakat	Partisipasi sosial berjalan Keterlibatan swasta dan swadaya masyarakat
Faktor penyebab kemiskinan	Kemiskinan kultural	Kemiskinan struktural
Program Penanggulangan Kemiskinan	<p>Keluarga miskin di daerah perkotaan lebih berpeluang dikembangkan untuk peningkatan kesejahteraan karena kemiskinan yang ada lebih bersifat struktural.</p> <p>Motivasi dan menumbuhkan semangat keluar dari kemiskinan perlu ditekankan untuk keluarga miskin di daerah perdesaan selain pronakis yang ada karena kemiskinan di daerah perdesaan bersifat kultural.</p> <p>Program pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro dan kecil relevan dan kemungkinan bisa berkembang mengingat keluarga miskin tetap memiliki aset ekonomi dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.</p> <p>Program pelatihan perlu menyesuaikan dengan struktur umur, tingkat pendidikan SD, dan curahan waktu luang agar efektif.</p> <p>Program yang bersifat charity masih relevan karena beberapa keluarga memiliki kondisi ekonomi yang sangat miskin dan tidak memiliki potensi</p>	

VI. PENUTUP

A. Kesimpulan

Kemiskinan merupakan kondisi yang tidak pernah terselesaikan karena sifatnya multi dimensi. Kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural merupakan jenis kemiskinan yang terdapat didaerah penelitian. Jumlah anggota keluarga yang besar dan tingkat pendidikan yang rendah, dan diversifikasi pekerjaan merupakan faktor yang penyebab kemiskinan di daerah perdesaan. Sementara itu, aksesibilitas pada sarana ekonomi dan pemerintahan merupakan faktor yang mempengaruhi kemiskinan di daerah dataran.

Faktor penyebab kemiskinan yang berbeda ini berdampak pada treatment penanggulangan kemiskinan yang berbeda dikedua wilayah tersebut. Sentuhan kognitif untuk memotivasi keluarga miskin keluar dari kemiskinan secara internal perlu diperhatikan untuk keluarga-keluarga miskin di daerah perdesaan. Sedangkan mengurangi kesenjangan aksesibilitas atau pembangunan spot-spot ekonomi di daerah dataran merupakan langkah tepat. Keluarga miskin dengan kreativitas yang dimiliki mampu mengembangkan peluang-peluang ekonomi.

B. Saran

Penelitian ini mendukung teori yang diungkapkan oleh R.Chambers bahwasannya keterisolasian wilayah merupakan salah satu variabel perangkap kemiskinan. Kebijakan pro poor sangat menentukan

dinamika ekonomi keluarga miskin, terutama di daerah dataran. Pembangunan sarana dan prasarana sosial ekonomi yang didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai merupakan point penting untuk membuka kran ekonomi suatu wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Chatterjee. Samprit, Jeffrey S.Simonof. 2012. *Handbook of Regression Analysis*.
- Field, J. (2014). *Modal Sosial. Bantul* : Kreasi Wacana Offset.
- Mahendra, W. (2009). *Keberdayaan Perempuan dalam Pengembangan Off Farm Activity: Industri Kerajinan Batik Tulis (Studi Alternatif Penanggulangan Kemiskinan Petani Desa Lahan Kering)*. M'Power. No. 9 Vol 9. Maret 2009
- Makmun. (2003). Gambaran Kemiskinan dan Action Plan Penanganannya, Jurnal "Kajian Ekonomi dan Keuangan", volume 7 no.2, edisi Juli.
- Nasikun. (2001). *Isu dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan. Magister Administrasi Publik*. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Suparlan, D. P. (1984). *Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan dan Yayasan Obor Indonesia.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers
- The World Bank. (2011). *Social Capital in Poverty Reduction and Economic Development*. <http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALDEVELOPMENT/EXTSOCIALCAPITAL/0,,contentMDK:20186616~menuPK:418214~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:401015,00.html>

